

---

## MENYEMAI KULTUR *GOOD GOVERNANCE* MELALUI PENDIDIKAN

Oleh: *Esa Nur Wahyuni*  
Mahasiswa S2 program pascasarjana  
Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang

### Abstrak

*Sampai saat ini, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada citra pemerintahan yang buruk yang ditandai dengan saratnya tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada hampir seluruh struktur dan pranata birokrasi yang ada, baik pada departemen pemerintahan maupun non-pemerintahan (swasta). "Reformasi" sebagai sebuah fase sejarah politik bangsa Indonesia yang baru, bercita-cita untuk "mengubur" pemerintahan yang buruk itu, dan menggantinya dengan menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Suatu pemerintahan yang baik dapat terwujud, apabila disokong oleh pilar-pilar yang mendukungnya. Salah satu dari pilar-pilar tersebut adalah kultur (culture) yang berkembang dalam masyarakat harus mendukung terhadap agenda tersebut. Kultur atau budaya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila ditopang oleh pendidikan. Pendidikan diyakini dapat memberi ruh, arah, dan kekuatan untuk mendukung terwujudnya kultur good governance.*

**Kata Kunci:** *Good Governance, Kultur, dan Pendidikan*

Berakhirnya Orde Baru yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto dari kekuasaan pada Mei 1998, kemudian disusul dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik, bangsa Indonesia dihadapkan pada keharusan menata kembali sistem sosial, politik, ekonomi, dan kenegaraan yang sejalan dengan semangat baru yang berkembang kuat di tengah-tengah

masyarakat. Semangat baru ini, yang kemudian dirumuskan dalam istilah "reformasi" mengacu pada penciptaan tatanan berbangsa yang demokratis di semua aspek kehidupan.

Perubahan Indonesia menuju demokrasi kelihatan tidak bisa dihindarkan. Tetapi, pada saat yang sama diakui bahwa pertumbuhan demokrasi atau

transisi Indonesia secara damai menuju demokrasi, juga menimbulkan banyak kegamangan dan kecemasan. Jika demokrasi dipahami sebagai *peaceful resolution on conflict*, yang terjadi justru sebaliknya, kita menyaksikan semakin meningkatnya kecenderungan penyelesaian konflik melalui cara-cara tidak demokratis, seperti penggunaan *mob politics*, *money politics*, dan cara-cara *undemocratic* lainnya. Perkembangan seperti ini jelas merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia menuju kehidupan demokratis.

Dalam kerangka upaya demokratisasi ini, masalah perwujudan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) menjadi agenda yang penting diperhatikan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tanpa perwujudan sistem pemerintahan yang bersih, maka proses reformasi tidak akan terwujud dan berjalan dengan baik.

*Good governance* sebagai konsep tentang tatanan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari pendidikan. Terwujudnya *good governance* dalam kehidupan bernegara merupakan refleksi dari kondisi masyarakat yang mendukung terlaksananya *good governance*. Kondisi suatu masyarakat yang siap dan mendukung *good governance* itu, tidak terlepas pula dari budaya yang ada dalam masyarakat. Budaya masyarakat berkembang karena adanya pendidikan.

Tulisan ini akan menganalisis tentang upaya membangun kultur *good*

*governance* melalui pendidikan. Masalah pokok ini diuraikan ke dalam dua pertanyaan berikut: Pertama, bagaimana hakekat kultur *good governance*. Kedua, bagaimana perspektif pendidikan dalam menciptakan kultur *good governance*.

### Hakekat Kultur *Good Governance*

Wacana *good governance* mendapatkan relevansinya di Indonesia, karena tiga alasan: Pertama, krisis ekonomi dan politik yang masih terus-menerus dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kedua, masih banyaknya korupsi dan berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Ketiga, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Alasan lain adalah masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. (Hendarto dan Suhendar, 2002)

Pengertian umum tentang *good governance* adalah suatu pemerintahan yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: setiap kebijakan diputuskan dengan melibatkan atau keikutsertaan masyarakat (*participation*), tanggap terhadap arus bawah (*responsiveness*), bertumpu pada ajaran supremasi hukum (*rule of law*), bertanggung jawab (*accountability*), efektif, efisien, bersih, dan transparan. Jadi, suatu pemerintahan dapat disebut "baik" apabila proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas partisipasi masyarakat, tanggap terhadap



aspirasi masyarakat, mencerminkan keragaman yang tumbuh dalam masyarakat, bertanggung jawab pada masyarakat sebagai sumber dan sasaran serta kebijakan yang dibuat, dapat dilaksanakan dengan ongkos yang rendah (*low cost*) dan dalam waktu cepat, dapat dijalankan sesuai dengan tujuan, pelaksanaan dikontrol, dapat diketahui oleh anggota masyarakat seluas-luasnya, dan didasarkan atas aturan-aturan yang jelas. Menurut MM Billah, istilah ini merujuk pada arti asli kata *governing* yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam satu negeri. Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah *good governance* tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi non-pemerintah (ornop) seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap *good governance* tidak selayaknya ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan *good governance* pada negara. (Billah, 2001:41)

Pada dasarnya, konsep *good governance* bertumpu pada konsep "sistem pemerintahan yang demokratis". Tegasnya, *good governance* adalah pemerintahan yang demokratis seperti yang dipraktekkan dalam negara-negara demokrasi maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa Barat. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik karena paling merefleksikan sifat-sifat *good governance* yang secara normatif dituntut kehadirannya bagi suksesnya suatu bantuan badan-badan dunia di negara-negara sasaran. Ia merupakan alternatif terhadap sistem pemerintahan yang lain, misalnya, totalitarianisme Komunis, otoritarianisme militer, Demokrasi Terpimpin, dan lain-lain, yang sempat populer di negara-negara Dunia Ketiga di masa Perang Dingin. (Mujani, 2002:1)

Sesuai dengan pengertian di atas, maka pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses dan hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan lepas dari gerakan-gerakan anarkhis yang bisa menghambat proses dan lajunya pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemamuran sebagai basis model dari pemerintahan. Pemerintahan itu dapat dikatakan baik, jika produktif dan

memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang dan bahagia serta *sense of nationality* yang baik. Semua indikator itu diukur dengan paradigma pemerataan, sehingga kesenjangan itu secara dini terus diperkecil. Proses pelaksanaan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan amanah pemerintahannya juga harus dilakukan dengan penuh transparansi serta didukung dengan manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). (Tim ICCE, 2003:181-182)

Ketika *good governance* diletakkan dalam perspektif demokrasi, maka *good governance* pada dasarnya merupakan hasil dari masyarakat atau setidaknya cerminan dari masyarakat. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik karena paling merefleksikan sifat-sifat masyarakat. Baik atau buruknya masyarakat akan menentukan baik tidaknya kinerja pemerintahan. Kalau pemerintahan kita korup, tidak efisien, misalnya, harus diletakkan dalam konteks masyarakat, bahwa itu semua merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri. Faktor penting yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintahan adalah "kultur politik" masyarakat pada umumnya.

Kultur politik adalah orientasi

individu dalam sistem politik terhadap obyek politik dalam sistem tersebut. Pemerintahan yang baik, yakni pemerintahan demokratis, membutuhkan kultur demokrasi atau *civic culture* untuk membuatnya *performed*. Kultur demokrasi itu berada dalam masyarakat itu sendiri, dan karena pemerintahan itu merupakan refleksi masyarakat maka kultur politik yang dominan di dalam masyarakat akan membentuk bagaimana kinerja pemerintahan itu sendiri. Elite politik sekalipun harus dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang laus, atau setidaknya adalah elit politik tersebut "tertanam" dalam masyarakat di mana kultur politik masyarakat merupakan bagian penting darinya. Jadi, mencermati variasi dalam *civic culture* masyarakat ini menjadi penting untuk menjelaskan variasi dalam kinerja pemerintahan, baik dan buruk. (Mujani, 2002:1)

Kepercayaan terhadap pemerintahan merupakan sikap yang sangat penting sebagai salah satu indikator hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintahan yang baik, sebaiknya jika pemerintahan tidak dipercaya, maka pemerintahan akan mengalami krisis kepercayaan masyarakat. Karena itu perlu diciptakan "kultur partisipasi" (*participation culture*) dalam masyarakat. Kultur partisipasi adalah orientasi dan sikap bahwa keterlibatan negara dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan publik dipandang sangat penting. Seorang warga negara berkultur partisipasi bila ia punya



pandangan atau persepsi, dan punya sikap terhadap obyek politik, yakni warga negara selain dirinya, kelompok-kelompok sosial, organisasi politik seperti partai politik, lembaga perwakilan politik (DPR/MPR), pemerintah sebagai pelaksanaan kebijakan publik baik pusat maupun daerah/ lokal, dari lembaga kepresidenan sampai kepala desa/kelurahan bahkan tingkat Rukun Tetangga (RT), pengawas dan penegak kebijakan (kehakiman, kejaksaan, dan polisi), dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Secara umum, warga yang berkultur partisipasi adalah mereka yang tertarik dengan urusan-urusan publik atau politik secara umum, punya sikap partisan, punya keyakinan bahwa dirinya penting dalam hubungannya dengan sistem politik dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya, dan juga percaya terhadap berjalannya sistem politik secara umum.

Agar cita-cita mewujudkan good governance dapat tercapai, maka perlu ditopang oleh upaya-upaya berikut:

*Pertama*, partisipasi (*participation*). Semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan

sosial, politik, birokrasi, dan ekonomi.

*Kedua*, penegakan hukum (*rule of law*). Santoso (2001), menegaskan bahwa proses mewujudkan cita *good governance* harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *role of law*, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. supremasi hukum; b. kepastian hukum; c. hukum yang responsif; d. penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif; dan e. independensi peradilan.

*Ketiga*, transparansi (*transparency*). Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi pemerintah maupun swasta, sektor publik maupun non-publik harus dilakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel.

*Keempat*, responsif (*responsiveness*). Yakni, pemerintah harus sensitif dan cepat mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. Pemerintah yang sensitif, peka atau tanggap terhadap keinginan masyarakatnya tidak harus menunggu sampai mereka menyampaikan keinginannya tersebut, tetapi pemerintah harus mengambil inisiatif terlebih dulu dengan mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. (Mujani, 2002:2)

*Kelima*, konsensus dan

permufakatan. Setiap pengambilan keputusan harus diambil secara konsensus, yakni pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama. Cara pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen masyarakat sehingga memiliki legitimasi untuk melahirkan *coercive power* (kekuatan memaksa) dalam upaya mewujudkan efektivitas pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan prinsip pada praktiknya sangat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, kultur demokrasi, serta tata aturan dalam pengambilan kebijakan yang berlaku dalam sebuah sistem.

*Keenam*, kesetaraan dan keadilan (*equity and justice*). Dalam setiap pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan faktor kesetaraan dan keadilan. Indonesia adalah bangsa yang plural, baik dilihat dari segi agama, budaya, suku maupun etnik. Pluralisme ini bisa menjadi kekuatan sekaligus perpecahan apabila kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan dibedakan. Oleh karena itu, prinsip *equity* dan *justice* harus diperhatikan agar tidak memunculkan benturan-benturan dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

*Ketujuh*, efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*). Indikator pemerintahan yang baik apabila efektif dan

efisien, yakni berdayaguna dan berhasil guna. Kriteria efektif diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan efisiensi biasanya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan tetapi menjangkau kepentingan yang luas, maka pemerintahan itu dapat digolongkan pemerintahan yang efisien. Citra itulah yang menjadi tuntutan dalam upaya mewujudkan cita *good governance*.

*Kedelapan*, akuntabilitas (*accountability*). Prinsip akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pejabat publik terhadap rakyatnya yang memberi delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

*Kesembilan*, visi strategis (*strategic vision*). Visi strategis adalah pandangan-pandang strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Mengetahui fenomena dan kecenderungan akan datang adalah penting karena perubahan dunia dan globalisasi yang ditopang oleh kecanggihan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat. Negara-negara yang tidak peka menangkap perubahan global itu, tidak saja akan tertinggal oleh bangsa lain, tetapi akan terpuruk dan bahkan tenggelam dari



---

pergaulan antar bangsa-bangsa.

### Peran Pendidikan

Implementasi *good governance* seperti dikemukakan di atas, harus didukung oleh kultur masyarakat yang mendukung konsep dan ide itu. Pendidikan merupakan salah satu wujud kultur yang berkembang dalam masyarakat, dan dari pendidikan pula akan melahirkan kultur yang terjadi di masyarakat. Sehingga ada hubungan dialektika antara pendidikan dan kultur. Di sinilah letak penting pendidikan dalam menciptakan kultur yang mendukung ide *good governance* tersebut, karena antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan integratif yang saling terkait.

Pendidikan, baik secara teoritik maupun praksis tidak dapat terlepas dari kebudayaan. Pendidikan tidak terjadi di dalam suatu suasana yang vakum tetapi terjadi karena interaksi antara manusia di dalam masyarakat yang berbudaya. Oleh sebab itu, pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan. Kebudayaan itu dinamis dan terus berkembang karena adanya proses pendidikan. Proses pendidikan bukan hanya proses transformasi nilai-nilai kebudayaan, tetapi juga merupakan pengembangan bahkan dapat mematikan kebudayaan. Sebagai proses transformasi, pendidikan mentransformasikan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi penerusnya. Pendidikan akan membentuk pribadi-pribadi yang kreatif yang menjadi

penggerak dan pengembang dari jaringan kebudayaan di mana ia hidup. Pribadi yang tidak kreatif dan tidak produktif akan menjadi beban bagi masyarakatnya.

Selama Orde Baru, proses pendidikan telah mengalami distorsi yakni sebatas proses indoktrinasi dan telah membatasi kebudayaan hanya pada aspek intelektual semata-mata. Kebudayaan itu sendiri termasuk aspek-aspek seni, teknologi, ilmu pengetahuan, moral, dan agama; namun demikian selama ini pendidikan dalam arti *schooling* telah dibatasi hanya pada pengembangan intelektual dan mengarahkan sumber daya manusia kepada kebutuhan perkembangan industri. Nilai-nilai moral, nilai-nilai intelektual, dan nilai-nilai kebudayaan telah diabaikan. Spektrum pengembangan inteligensi manusia hanya dibatasi pada inteligensi bagi pengembangan intelektual dan teknologi. Inteligensi emosional, inteligensi interpersonal dan intrapersonal, inteligensi spiritual telah diabaikan. Hasilnya adalah kepekaan manusiawi manusia menjadi tumpul, yang tertinggal hanyalah manusia yang dikuasai oleh nafsu-nafsu dan nilai-nilai keserakahan, kekerasan, dan kekuasaan.

Upaya untuk mengaktualkan *good governance* melalui pendidikan kelihatannya masih harus menempuh jalan yang panjang. Pendidikan haruslah melakukan reorientasi dan berusaha menerapkan paradigma baru pendidikan nasional, yang tujuan akhirnya adalah pembentukan masyarakat Indonesia yang

demokratis dan berpegang pada nilai-nilai civility (keadaban). Tujuan ini dapat tercapai apabila pendidikan mampu mengembangkan potensi manusia secara utuh. Yakni, manusia (anak didik) dipandang sebagai kesatuan yang bulat-kesatuan jasmani-ruhani, kesatuan makhluk pribadi, makhluk sosial-makhluk Tuhan, kesatuan melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya.

Melihat hakekat *good governance* sebagaimana diuraikan di atas, maka ada beberapa nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam masyarakat sejak dini melalui pendidikan, agar nilai-nilai menjadi integral dalam kepribadian dan menjadi budaya masyarakat itu sendiri. Sehingga hasil akhir dari pendidikan dapat menciptakan masyarakat yang siap dengan ide *good governance*, di samping terciptanya generasi yang bisa menjadi pemimpin atau pelaku negara dengan tatanan yang baik.

Adapun nilai-nilai yang perlu dikembangkan oleh dunia pendidikan dalam rangka menciptakan *good governance* adalah: *Pertama*, demokrasi. Dalam pengembangan dan pengimplikasian ide *good governance*, demokrasi merupakan salah satu nilai-nilai budaya yang sangat penting dan mendasar karena dengan kultur demokrasi, maka *good governance* dapat tumbuh, berkembang, dan hidup dengan subur. Pada Orde Reformasi sekarang ini, demokrasi mulai disadari oleh segenap lapisan masyarakat. Namun sayang sekali, nilai-nilai demokrasi masih

dipahami sebagai tuntutan hak-hak semata dan mengesampingkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat mengemban misi menanamkan nilai-nilai, dan hendaknya demokrasi ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif saja, tetapi juga menjadi jiwa bagi pendidikan itu sendiri. Praktek-praktek pendidikan yang indoktrinatif dan bersikap sentralistik akan mematikan potensi individu. Proses belajar mengajar yang mematikan daya inovatif dan berpikir kreatif sudah tidak pada tempatnya lagi.

*Kedua*, moral. *Good governance* tidak akan dapat diapai bila sumber daya yang menjalankannya tidak memiliki moral yang baik. Karena moral merupakan landasan yang penting bagi seseorang untuk bersikap, bertindak, dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan hidup sederhana merupakan nilai-nilai yang mutlak dimiliki oleh setiap pemimpin, karena nilai-nilai tersebut seorang pemimpin tidak bertindak hanya berdasarkan nafsu dan hasrat untuk menguasai tetapi menganggap bahwa kekuasaan merupakan suatu amanah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pendidikan nasional yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya sangat berperan penting dalam pengembangan nilai-nilai moral, dan seyogyanya pendidikan moral tidak hanya sekedar



pengetahuan moral saja tetapi lebih jauh dari itu nilai-nilai moral dapat ditanamkan menjadi kepribadian setiap anak didik.

*Ketiga*, berpikir kreatif-kritis. Kebudayaan di negara kita mengenal sistem feodalisme dan hierarki pada masyarakat, sehingga hal ini baik langsung maupun tidak membentuk masyarakat feodal. Masyarakat feodal kurang memperhatikan kepada kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Masyarakat feodal lebih percaya kepada tokoh-tokoh politik, tokoh agama (kyai), dan tokoh lainnya yang dipandang kharismatik, dari pada menggunakan nalar pikiran kritisnya sendiri dalam pengambilan keputusan. Masyarakat feodal tidak merasa kalau dirinya sering hanya dijadikan obyek dan komoditi yang laku dijual untuk bargaining yang bermotif politik maupun ekonomi yang menguntungkan secara sepihak-pemimpinya saja- sementara dirinya tidak memperoleh bagian apa-apa. Keadaan seperti ini, tidak terlepas dari sejarah bangsa kita yang mempunyai pengalaman buruk pada masa penjajahan Belanda dan Jepang yang membunuh segala bentuk berpikir kreatif dan kritis. Warisan sejarah ini justru kemudian dilanggengkan dengan praktek politik dan pendidikan yang tidak mencerdaskan masyarakat. Tokoh politik dan tokoh agama sengaja mengambil keuntungan dari kondisi kepatuhan masyarakat (baca: budaya *sami'na wa atho'na*) tersebut, dan bagaimana kultur semacam itu terus dilestarikan. Idealnya pendidikan sebagai wadah pendewasaan

manusia dapat mengembangkan kemampuan kreatif dan kritis. Dalam konteks pembentukan budaya masyarakat untuk implementasi budaya *good governance*, maka diharapkan pendidikan dapat menumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap pemerintahan sehingga ada kontrol yang baik, balance, dan proporsional. Sedangkan dalam kaitannya dengan pelaku *good governance*, pendidikan dapat mencetak pemimpin-pemimpin yang kreatif, kritis, dan produktif dalam menjalankan roda pemerintahan.

### Kesimpulan

*Good governance* sebagai sebuah ide dan wacana untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik sangat penting diperhatikan. Karena tanpa pemerintahan yang baik maka proses transformasi tidak dapat berjalan seperti yang dicitakan. *Good governance* dapat berkembang dan teraplikasi apabila didukung oleh masyarakat yang kondusif bagi ide ini. Masyarakat yang dapat mendukung ide ini tidak dapat terlepas dari budaya masyarakat yang berkembang, sedangkan kebudayaan berkembang melalui pendidikan. Di sinilah letak urgensi dan strategisnya pendidikan dalam menciptakan kultur *good governance*.

Demokrasi, moralitas, dan berpikir kreatif-kritis merupakan nilai-nilai yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam menciptakan kultur *good governance*. Melalui pendidikan, nilai-nilai tersebut ditanamkan dan ditransformasikan ke

dalam budaya masyarakat. Pendidikan nilai-nilai tersebut tidak sekedar pengetahuan kognitif saja, melainkan menjadi integral dalam pribadi generasi muda, calon pemimpin bangsa masa depan.

#### Daftar Pustaka

Hendarto, Agung dan Nizar Suhendar. 2002. *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah* (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia).

MM. Billah. 2001. "Good Governance dan Kontrak Sosial", Jurnal Prisma, Jakarta: LP3ES.

Mujani, Saiful, et.al. 2002. "Islam dan Kultur Good Governance Masyarakat Indonesia", TOR Seminar Nasional (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah).

Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: UIN Jakarta, 2003).

Santoso, Mas Ahmad. 2001. *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEI).

Affan Gaffar. 2001. "Etika Birokrasi dan Good Governance", Makalah, Jakarta.

Tilaar, HAR. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21* (Magelang: Indonesia Tera).

Fadjar, A. Malik. 1998. *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998).

Tilaar, H.A.R.. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta).

Maksum, Ali dan Luluk Yunan. 2004. *Paradigma Pendidikan Universal Di Era Modern dan Pos-Modern: Mencari "Visi Baru" atas "Realitas Baru" Pendidikan Kita* (Yogyakarta: RCISoD).

Muthohar, Ahmad. et.al. 2000. *Pendidikan Islam, Demokratisasi, dan Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).